

Kata Pengantar



Alhamdulillah Rabbil Alamiin kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan SKPD selama Tahun 2017.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. LKj Tahun 2017 disusun berdasarkan Renja 2017 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (Renstra Tahun 2016-2021).

LKj Dinas Komunikasi dan Informatika disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Komitmen dalam penyusunan LKj, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud, dan tujuan, kedudukan tupoksi, struktur organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi dengan analisis perkembangan strategis. Adapun aspek Perencanaan Kinerja memuat tentang perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang sebelumnya dikaitkan dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian kinerja organisasi, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja tahun 2017, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan kinerja Tahun 2017 telah banyak memberikan sumbangsih bagi perkembangan kelembagaan, SDM, dan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informasi, maupun statistik sektoral dan persandian di Sumatera Barat secara khusus. Dari 6 indikator, kesemuanya telah memenuhi kriteria yang sangat tinggi. Hal ini tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan.

Analisa efisiensi sumberdaya juga menunjukkan angka diatas 1 artinya terjadi



efisiensi yang cukup tinggi. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima Kasih

Padang, Januari 2018

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Barat,

Ir. Yeflin Luandri, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19610824 198012 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Instansi Pemerintah.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja (IK) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.

Dari empat indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 menunjukkan bahwa capaian keempat indikator berada pada kriteria tinggi dan sangat tinggi. Tiga indikator interval nilai realisasi kinerjanya berada di atas 91% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi, terdiri dari Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan, Pelaksanaan Program/Kegiatan, Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi, Indeks E-Government Pemerintah Provinsi. Sedangkan satu indikator lagi yaitu Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah dengan interval nilai realisasi kinerja sebesar 86,96% menunjukkan kriteria penilaian realisasi kinerja yang tinggi.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pemerintahan Daerah Sumatera Barat kedepan.